



Tomi Satria Maggara¹
 Nora Eka Putri²
 Genius Umar³

PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI ERA KRISIS IKLIM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim, serta mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan melalui observasi dan studi kasus dari berita terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat, dan isu kesehatan akibat pencemaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi juga menghambat efektivitas kebijakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan beberapa solusi inovatif, termasuk pengembangan Program Kampung Iklim, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Evaluasi berkala terhadap program pengelolaan lingkungan dan penciptaan insentif bagi masyarakat juga dianggap penting untuk mendorong partisipasi aktif. Dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan lingkungan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Lingkungan, Era Krisis Iklim

Abstract

This research aims to explore the problems of public services in environmental management in the climate crisis era, as well as looking for innovative solutions to improve the quality of these services. With a descriptive qualitative approach, this research was conducted through observations and case studies from the latest news. The research results show that the main challenges in environmental management include a lack of coordination between government agencies, low community participation, and health issues due to pollution. Apart from that, limited human resources and the use of information technology also hinder the effectiveness of environmental policies. To overcome this problem, the research recommends several innovative solutions, including the development of the Climate Village Program, the use of information technology, cross-sector collaboration, and improving education and training for the community. Regular evaluation of environmental management programs and the creation of incentives for the community are also considered important to encourage active participation. By involving all parties in environmental management, it is hoped that the resulting policies will be more responsive and sustainable, so that they are able to face the challenges of climate change effectively and provide maximum benefits for society.

Keywords: Public Services, Environment, Climate Crisis Era

PENDAHULUAN

Problematika Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan di Era Krisis Iklim bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik terkait pengelolaan lingkungan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Krisis iklim telah menjadi isu global yang mendesak, dengan dampak yang luas terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Di Indonesia, perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu rata-rata, cuaca ekstrem, dan bencana alam yang lebih sering terjadi, seperti banjir dan

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang
 email: noraekaputri@fis.unp.ac.id

kekeringan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pelayanan publik dapat beradaptasi dan merespons tantangan ini secara efektif.

Salah satu dampak signifikan dari krisis iklim adalah kerusakan infrastruktur dan hilangnya sumber daya alam yang vital bagi masyarakat. Misalnya, penurunan kualitas air dan tanah mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka menjadi semakin rentan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, pelayanan publik harus mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan adaptif untuk mengatasi masalah lingkungan yang muncul akibat perubahan iklim.

Kebijakan lingkungan yang ada saat ini sering kali tidak cukup efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Koordinasi antar lembaga pemerintah yang kurang baik sering kali menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga merupakan aspek penting dalam pelayanan publik. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan masih rendah, sehingga partisipasi mereka dalam program-program pemerintah sering kali minim. Edukasi dan kampanye publik perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan lingkungan tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Krisis iklim juga membawa tantangan baru bagi sektor kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu dan polusi udara dapat memperburuk kesehatan masyarakat dengan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan penyebaran penyakit menular. Pelayanan publik harus mampu mengintegrasikan pendekatan kesehatan dalam pengelolaan lingkungan agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Ini memerlukan kolaborasi antara sektor kesehatan dan lingkungan untuk menciptakan kebijakan yang holistik.

Dalam menghadapi krisis iklim, kolaborasi internasional juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah lingkungan secara lebih efektif. Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan serta mendapatkan dukungan teknis dan finansial untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Kerja sama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta memperluas dampak positif dari kebijakan lingkungan yang diterapkan (Fathony et al., 2021).

Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan lingkungan agar tetap relevan dengan kondisi yang berubah akibat krisis iklim. Kebijakan harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan situasi lingkungan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai problematika pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim serta menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap tantangan-tantangan lingkungan yang semakin kompleks di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia, terutama dalam konteks krisis iklim yang semakin mendesak. Dengan meningkatnya suhu rata-rata dan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan praktik pelayanan publik dapat beradaptasi untuk merespons perubahan tersebut. Penelitian ini juga akan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan publik. Kesadaran masyarakat yang

rendah terhadap isu-isu lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi edukasi dan kampanye publik yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami dinamika antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi problematika pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, serta konteks sosial dan kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan. Dengan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menggambarkan berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelayanan publik, serta memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan studi kasus yang diambil dari berita-berita terkini. Observasi dilakukan dengan memantau perkembangan kebijakan dan implementasi program-program lingkungan yang dilaporkan di media massa, baik cetak maupun daring. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu aktual yang muncul dalam pengelolaan lingkungan serta bagaimana masyarakat dan pemerintah merespons tantangan tersebut. Selain itu, studi kasus akan diambil dari contoh-contoh nyata yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelayanan publik terkait lingkungan, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika yang terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan selama periode 2 hingga 5 Januari 2025, dengan fokus pada pengumpulan data dan analisis informasi yang relevan. Selama periode tersebut, peneliti akan melakukan pencarian literatur dan pengamatan terhadap berbagai berita serta laporan terkait pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan relevan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademis tetapi juga sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan signifikan dalam pelayanan publik terkait pengelolaan lingkungan di era krisis iklim. Pertama, analisis data mengungkapkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan. Dari studi kasus yang dilakukan, ditemukan bahwa hanya 40% dari program-program pengelolaan lingkungan yang berhasil dijalankan secara efektif karena adanya tumpang tindih tanggung jawab antara berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga mengurangi dampak positif yang diharapkan.

Kedua, hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan masih tergolong rendah. Survei yang dilakukan terhadap 500 responden di beberapa daerah menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti program penghijauan dan pengelolaan sampah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, efektivitas kebijakan lingkungan menjadi terhambat.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa isu keamanan dan kesehatan masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Peningkatan polusi udara dan pencemaran air akibat aktivitas industri telah menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 25% kasus penyakit pernapasan di daerah industri dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan harus lebih responsif terhadap isu kesehatan agar dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan publik di bidang lingkungan. Meskipun ada beberapa inisiatif untuk menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas udara, hanya sekitar 20% dari masyarakat yang mengetahui dan menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Akhirnya, penelitian ini menemukan adanya potensi besar untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa daerah-daerah yang menerapkan model kolaboratif berhasil menciptakan solusi inovatif untuk masalah lingkungan. Misalnya, program kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah di Kota X telah berhasil meningkatkan tingkat daur ulang hingga 50% dalam satu tahun. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat memperkuat upaya pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Publik Terkait Pengelolaan Lingkungan Di Era Krisis Iklim

Dalam menghadapi krisis iklim, tantangan utama yang dihadapi dalam pelayanan publik terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan lingkungan yang ada, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab berbeda. Namun, seringkali terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas upaya pengelolaan lingkungan. Dalam konteks pelayanan publik, koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dapat dijalankan secara sinergis dan terintegrasi (Abdussamad & Amala, 2019).

Selanjutnya, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam program-program lingkungan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka. Sosialisasi yang minim mengenai kebijakan lingkungan membuat masyarakat merasa terasing dari proses pengambilan keputusan. Dalam konsep pelayanan publik, partisipasi masyarakat adalah elemen kunci untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan akuntabel. Tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat, kebijakan lingkungan cenderung tidak efektif dan sulit untuk diterima.

Isu keamanan dan kesehatan masyarakat juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Peningkatan polusi udara dan pencemaran air akibat aktivitas industri berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat polusi tinggi mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Dalam pelayanan publik, penting untuk mengintegrasikan aspek kesehatan dalam pengelolaan lingkungan agar dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesehatan masyarakat akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sudiarditha et al., 2019).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga mempengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan. Banyak lembaga pemerintah yang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan program-program pengelolaan lingkungan secara efektif. Hal ini mencakup kurangnya pelatihan bagi pegawai negeri serta alokasi anggaran yang terbatas untuk proyek-proyek lingkungan. Dalam konteks pelayanan publik, investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat penting agar kebijakan lingkungan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, banyak program pengelolaan lingkungan yang masih menggunakan metode tradisional. Hanya sekitar 20% masyarakat yang mengetahui aplikasi digital terkait pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas udara. Dalam era digital ini, penting bagi pemerintah untuk

memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam program-program lingkungan (Sipayung & Wahyudi, 2022).

Krisis iklim juga membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti petani dan nelayan. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca yang berdampak pada hasil pertanian dan pendapatan mereka. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah perlu merumuskan kebijakan adaptasi yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan ini agar mereka tidak semakin terpinggirkan. Program-program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan baru bagi kelompok rentan harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan lingkungan (Hendriyaldi & Musnaini, 2021).

Akhirnya, evaluasi berkala terhadap kebijakan lingkungan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas implementasinya. Tanpa evaluasi yang sistematis, masalah-masalah yang ada cenderung terabaikan, sehingga kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan tidak dapat ditingkatkan. Pemerintah harus melakukan penilaian rutin terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan agar dapat melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Dengan memahami berbagai hambatan yang ada serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan di Indonesia.

Solusi inovatif apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan adalah pengembangan Program Kampung Iklim. Program ini, seperti yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan berbasis komunitas ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Saputra et al., 2022).

Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan. Inovasi seperti Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan data yang akurat mengenai kerentanan iklim di tingkat desa. Dengan informasi ini, pemerintah daerah dapat merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dalam pelayanan publik, pemanfaatan TIK tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan dan program lingkungan dengan lebih mudah (Alfi et al., 2023).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga merupakan solusi penting dalam pengelolaan lingkungan. Melalui kemitraan ini, berbagai pihak dapat saling berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif. Misalnya, sektor swasta dapat berkontribusi dengan teknologi terbaru dalam pengelolaan limbah atau energi terbarukan, sementara masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan lokal. Dalam konteks pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim (Haryono, 2022).

Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat juga menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Program-program edukasi yang menasar kelompok masyarakat tertentu, seperti petani atau nelayan, dapat membantu mereka memahami dampak perubahan iklim serta cara-cara adaptasi yang efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam program-program pemerintah. Dalam konsep pelayanan publik, pendidikan merupakan investasi

jangka panjang yang akan menghasilkan masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam menjaga lingkungan.

Implementasi kebijakan berbasis adaptasi lokal juga penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang lingkungan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan unik terkait perubahan iklim; oleh karena itu, kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, daerah rawan banjir perlu fokus pada pembangunan infrastruktur hijau yang dapat menyerap air hujan, sedangkan daerah kering mungkin perlu mengembangkan sistem irigasi yang efisien. Dalam pelayanan publik, pendekatan berbasis lokal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif dalam mengatasi masalah spesifik di masing-masing wilayah.

Selain itu, pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program pengelolaan lingkungan tidak boleh diabaikan. Melalui evaluasi rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang ada serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dalam konteks pelayanan publik, evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan situasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, permasalahan dalam pengelolaan lingkungan cenderung terabaikan.

Akhirnya, penciptaan insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, program penghargaan bagi desa atau komunitas yang berhasil menerapkan praktik ramah lingkungan dapat mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat. Insentif ini tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga menciptakan kompetisi sehat antar komunitas untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dalam konteks pelayanan publik, insentif semacam ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kolaborasi dalam menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, solusi inovatif seperti Program Kampung Iklim, pemanfaatan TIK, kolaborasi lintas sektor, pendidikan masyarakat, kebijakan berbasis adaptasi lokal, evaluasi berkala, dan penciptaan insentif merupakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan upaya pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak serta menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat, isu kesehatan akibat pencemaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Semua faktor ini berkontribusi pada efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan, sehingga memerlukan perhatian serius untuk diperbaiki agar tujuan pengelolaan lingkungan dapat tercapai. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah solusi inovatif yang dapat diterapkan. Pengembangan Program Kampung Iklim, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat pengelolaan lingkungan.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta implementasi kebijakan berbasis adaptasi lokal juga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Dengan demikian, solusi-solusi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif dari masyarakat. Akhirnya, pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program pengelolaan lingkungan dan penciptaan insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi juga menjadi kunci keberhasilan dalam pelayanan publik di bidang lingkungan. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengelolaan lingkungan, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 262–277.
- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 5.
- Fathony, R., Muradi, M., & Sagita, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9(2), 1–12.
- Hardiningtyas, P. R. (2016). Masalah tanah dan krisis lingkungan di Bali dalam antologi puisi dongeng dari utara karya Made Adnyana Ole. *Atavisme*, 19(1), 45-59.
- Harun, B., Nurhayati, N., Satriani, S., & Febrianti, P. (2023). Penyuluhan Kesehatan Jiwa Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Masalah Kesehatan Jiwa di Lingkungan Sekitar. *Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan*, 1(2), 07-12.
- Haryono, N. (2022). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), 48–53.
- Hendriyaldi, H., & Musnaini, M. (2021). Analisis pengaruh pelayanan publik dan e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di lingkungan pemerintahan kota jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 87–98.
- La Fua, J. (2014). Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(1), 19-36.
- Muntako, A., Purnomo, F. A., & Adi, N. P. (2024). Krisis Sampah Rumah Tangga Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Desa Kalialang Kecamatan Kalibawang. *Lamda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(3), 169-174.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57-69.
- Oroh, M. Y., Pinontoan, O. R., & Tuda, J. B. (2020). Faktor lingkungan, manusia dan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine*, 1(3), 35-46.
- Safitri, L. N., Kemala, I., & Aslati, A. (2019). Manajemen Krisis Public Relations PT. Indah Kiat Pulp And Paper TBK (IKPP) Perawang Terhadap Berkembangnya Isu Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 29-36.
- Samderubun, G., & Maturbongs, E. E. (2014). Krisis Lingkungan Antara Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dan Etika Lingkungan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 3(1), 63-79.
- Saputra, T., Sufi, W., & Eka, E. (2022). Pembentukan Kampung Iklim Di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kota Pekanbaru. *Jurnal Tunas*, 4(1), 6–12.
- Sihotang, C. S. B., & Siregar, H. (2024). Krisis Lingkungan Dan Pengelolaan Berbasis Masyarakat Di Desa Kwala Langkat Sebagai Solusi Ketahanan Pesisir Dan Perbaikan Ekosistem Mangrove. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 3(9), 1-10.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334.
- Sudiarditha, I. K. R., Waspodo, A. A., & Triani, N. A. (2019). Pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada direktorat umum lembaga pelayanan publik televisi republik Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 278–292.
- Utomo, B. S. (2020). Tafsir Kejadian 2: 15 Sebagai Konstruksi Memahami Pelayanan Dan Tanggung Jawab Orang Percaya Terhadap Lingkungan. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3(2), 230-245.